

**JAWABAN**  
**PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA**  
**ATAS PERTANYAAN TERTULIS KOMISI I DPR RI**  
**DALAM RAPAT KERJA DENGAN PANGLIMA TNI**  
**PADA HARI KAMIS, TANGGAL 9 JUNI 2005**

**Kesimpulan 4.**

Berkaitan dengan akan dimulainya kembali program *International Military Education and Training* (IMET) AS, Komisi I DPR RI meminta kepada Panglima TNI agar dapat memanfaatkan program tersebut dengan mengikutsertakan perwira TNI berdasarkan prioritas, kebutuhan dan pendidikan yang bermanfaat bagi peningkatan kemampuan profesional TNI serta melalui seleksi peserta berdasarkan kriteria dan persyaratan TNI sendiri.

**Tindak lanjut.**

Untuk TA 2005 pihak Amerika Serikat telah menawarkan program IMET kepada TNI sebanyak 45 program dan saat ini sedang dalam proses, selanjutnya TA 2006 telah ditawarkan sebanyak 81 program. Untuk program IMET TA 2006 TNI merencanakan program yang akan diambil disesuaikan dengan kepentingan TNI.

**Kesimpulan 5.**

Komisi I DPR RI menegaskan agar kehadiran dan kegiatan personel militer asing dalam Operasi Tanggap Darurat pasca tsunami di Aceh harus tetap dalam koordinasi dan pengawasan TNI. Dalam hubungan ini, Panglima TNI menjelaskan bahwa saat ini personel militer asing sebagian besar telah meninggalkan Aceh dan jumlah yang masih berada di Aceh akan segera meninggalkan Aceh sesudah selesai penugasannya.

**Tindak lanjut.**

Sesuai dengan keputusan Pemerintah RI bahwa keberadaan personel militer asing dibatasi sampai dengan 26 Maret 2005, dan personel asing terakhir yang meninggalkan Aceh adalah Malaysia pada tanggal 16 Mei 2005.

**Pertanyaan 2.**

Dalam SDR (*Strategic Defence Review*) yang saat ini sedang dipersiapkan Dephan, terdapat beberapa point penting yang menjadi bahasan utama yaitu: problem dan rumusan tentang Konsep dan Persepsi Ancaman yang riil, rumusan tentang Prinsip-prinsip Pertahanan, dan Strategi Pertahanan serta Postur Pertahanan yang *compatible* dengan kebutuhan pertahanan berbasis laut, udara dan darat. Bagaimana TNI, sebagai komponen utama pertahanan, merespon, mengusulkan dan menganalisis point-point penting dalam SDR tersebut?

**Jawaban :**

*Strategic Defence Review* (SDR) saat ini sedang dalam tahap penyelesaian akhir oleh Dephan yang bertindak sebagai *leading sector* dalam penyusunannya.

Dalam proses penyusunannya TNI ikut memberikan masukan terhadap point-point penting yang terdapat dalam SDR, secara periodik melakukan pertemuan Panglima TNI bersama Kas Angkatan dengan Menhan beserta staf Dephan guna merumuskan

kajian terhadap perencanaan strategik. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa rencana pembangunan kekuatan TNI dalam 5 tahun kedepan lebih diarahkan untuk peningkatan kekuatan alutsista TNI AL, dan TNI AU sementara peningkatan kekuatan TNI AD melalui pengembangan kekuatan satuan tempur TNI AD dan komando kewilayahan di daerah perbatasan dan wilayah rawan konflik.

**Pertanyaan 3.**

Sejauhmana TNI telah memfokuskan force deployment di daerah-daerah perbatasan sebagai basis pertahanan sebagaimana direkomendasikan oleh Komisi I DPR RI. Bagaimana perkembangan gelar pasukan tersebut dan kendala apa yang dihadapi?

**Jawaban:**

- a. Panglima TNI telah menetapkan kebijakan untuk memprioritaskan pengembangan kekuatan dan perkuatan di wilayah perbatasan dan daerah konflik seperti yang telah dijelaskan pada jawaban pertanyaan Aktual butir 1 Kesimpulan 3.
- b. Kendala yang dihadapi sebagai berikut:
  - 1) Wilayah perbatasan yang perlu diamankan cukup luas dan kompleks sehingga pengerahan satuan pengaman perbatasan tanpa diimbangi pembangunan infrastruktur diwilayah tersebut serta Alutsista yang memadai, hasil yang dicapai menjadi jauh dari memadai.
  - 2) Kondisi geografis pulau-pulau terluar/terpencil sebagian besar kurang memenuhi syarat untuk ditempati pasukan mengingat tidak tersedia sumber daya air, dan dukungan transportasi sangat terbatas.
  - 3) Sebagai konsekuensinya KRI dan pesawat udara TNI AU harus sering melakukan patroli didaerah tersebut. Namun realitanya hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam frekuensi yang cukup tinggi karena jumlah alutsista yang dimiliki terbatas dihadapkan dengan situasi dan kondisi medan perbatasan yang cukup luas.
  - 4) Kekuatan satuan yang digelar di daerah perbatasan kurang memadai dihadapkan dengan kondisi medan, sehingga masih sering terjadi pelintas batas ilegal dan tindakan ilegal lainnya terutama di daerah perbatasan Papua, Kalimantan dan NTT.

**Pertanyaan 4.**

Obsesi sistem pertahanan yang kuat tidak hanya berkaitan dengan masalah konsep tetapi juga berkaitan dengan kualitas dan integritas SDM TNI, oleh karena itu kurikulum pendidikan TNI harus mengalami perubahan. Mohon dijelaskan sejauhmana perkembangan dalam upaya membentuk TNI sebagai tentara profesional yang berkemampuan dan berintegritas?

**Jawaban:**

Upaya TNI untuk mewujudkan tentara profesional dan berintegritas yang ditempuh melalui pembinaan pendidikan dengan cara mengevaluasi dan menyempurnakan kurikulum di semua lembaga pendidikan TNI untuk disesuaikan dengan tuntutan kondisi saat ini, sebagaimana yang ditetakan dalam UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Adapun penyempurnaan kurikulum yang telah dilakukan meliputi:

- a. Menghapus kurikulum Sosial Politik (Dwifungsi ABRI).

- b. Menambahkan jam pelajaran materi hukum yang mencakup Hukum Humaniter, HAM, dan UU TNI.
- c. Meningkatkan jumlah jam pelajaran kejuruan/profesi untuk pendidikan spesialisasi.
- d. Memisahkan dan meningkatkan kurikulum Operasi Gabungan.
- e. Menambah frekuensi dibukanya pendidikan spesialisasi untuk meningkatkan skill prajurit.

**Pertanyaan 5.**

Sistem pertahanan negara juga harus mampu memproyeksikan dan memprediksikan jumlah dan kualitas prajuritnya. Bagaimana kalkulasi Panglima TNI terkait dengan jumlah prajurit untuk bisa memenuhi kebutuhan pertahanan negara. Bagaimana konsep dan upaya Panglima untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit?

**Jawaban:**

a. Secara universal untuk memenuhi kebutuhan ideal pertahanan negara, jumlah kekuatan militer adalah 1% dari jumlah penduduk (2,2 juta prajurit), dan kebutuhan minimal 0,4% dari jumlah penduduk (880 ribu prajurit), itupun masih tergantung dengan kondisi geografi yang ada.

Kondisi nyata kekuatan personel TNI saat ini adalah 364.287 orang (41% dari kebutuhan minimal atau 16,5% dari kebutuhan ideal), terdiri dari TNI AD 278.499 orang, TNI AL 57.724 orang dan TNI AU 28.064 orang.

Dalam dua kali lima tahun ke depan, kekuatan personel TNI masih belum dapat memenuhi kebutuhan minimal pertahanan negara, dengan prediksi sebagai berikut:

- 1) Lima tahun pertama (Sampai dengan 2009). Terpenuhi jumlah prajurit sebesar 408.593 orang terdiri dari TNI AD 310.339 orang, TNI AL 65.940 orang dan TNI AU 32.314 orang.
- 2) Lima tahun kedua (2009-2014). Terpenuhinya jumlah prajurit sebesar 449.769 orang terdiri dari TNI AD 341.199 orang, TNI AL 72.265 orang dan TNI AU 36.305 orang.

Namun demikian konsekuensi dari peningkatan jumlah personil akan membawa dampak pada anggaran yang juga harus diperhitungkan.

- b. Konsep dan upaya TNI untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit:
  - 1) Ada suatu dilema besar yang dihadapi TNI saat ini. Untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, dengan anggaran yang tidak beranjak banyak dari tahun-ketahun maka, pengurangan personil menjadi salah satu jalan keluar. Namun demikian hal tersebut haruslah diimbangi dengan peningkatan jumlah maupun kualitas alutsista yang dimiliki. Sementara itu sebenarnya kekuatan personil TNI masih jauh dari cukup dengan pertimbangan yang disampaikan di atas, sementara alutsista yang dimilikinya baik dari kuantitas maupun kualitas juga masih jauh dari mencukupi.
  - 2) Sementara berdasarkan keputusan politik dalam hal ini UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 49 yang pada intinya menyatakan setiap prajurit berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari APBN. Kebijakan itulah

sekarang yang harus dijalankan TNI, sehingga kita putuskan bisnis TNI dihapuskan dalam 2 tahun ke depan dengan belum mendapatkan jalan keluarnya guna dapat memenuhi kesejahteraan prajurit secara layak.

**Pertanyaan 6.**

Sehubungan dengan saat ini Pemerintah melalui Menhan dan Menteri-menteri terkait lainnya sedang mempersiapkan konsep strategi dan program penghapusan “bisnis TNI”, pengalihan, dan pengelolaannya lebih lanjut, mohon dijelaskan konsep, masukan dan usul yang disampaikan oleh Panglima TNI mengenai hal tersebut.

**Jawaban:**

Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 76 ayat (1) diamanatkan dalam jangka waktu lima tahun agar pemerintah mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI. Menyikapi amanat tersebut pimpinan TNI telah menargetkan dalam waktu dua tahun seluruh bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI diserahkan kepada pemerintah.

Konsep pengalihan dan pengelolaan bisnis TNI dilaksanakan secara bertahap, sebagai berikut:

**Tahap pertama**, pendataan dan penggolongan kegiatan usaha yang masuk dalam bisnis TNI.

**Tahap kedua**, melikuidasi seluruh bisnis TNI.

**Tahap ketiga**, meningkatkan peran yayasan yang dikelola persatuan istri TNI untuk dapat lebih memberi kesejahteraan bagi keluarga TNI utamanya bagi mereka yang ditinggal mati/gugur dari suaminya atau pensiun karena cacat tanpa harus membentuk unit usaha, serta meningkatkan peran koperasi dilingkungan TNI guna dapat membantu meringankan prajurit dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Pertanyaan 7.**

Sehubungan dengan masih sangat minimnya budget pertahanan negara, bagaimana Panglima TNI menyiasati peningkatan dan pemanfaatan jumlah dan kualitas Alutsista yang sampai sekarang masih jauh dari memadai dalam mengcover kebutuhan sistem pertahanan?

**Jawaban:**

Guna menyiasati peningkatan dan pemanfaatan Alutsista baik secara kuantitas dan kualitasnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sistem pertahanan nasional maka sesuai dengan Kebijakan Strategis TNI 2005-2009 dan Pokok-pokok Kebijakan Panglima TNI tahun 2005, Pimpinan TNI mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

**1. Meningkatkan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan.**

Pemeliharaan Alutsista yang telah dimiliki TNI, dilaksanakan oleh masing-masing Angkatan dengan upaya-upaya perbaikan/pemeliharaan di fasilitas pemeliharaan dan perbaikan masing-masing, baik untuk mempertahankan tingkat operasional Alutsista maupun tingkat kualitas operasionalnya.

**2. Meningkatkan kegiatan Litbang dan memanfaatkan hasil Litbang**

Kegiatan Litbang dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan TNI dan industri nasional dalam pengembangan teknologi militer. Upaya yang dilakukan TNI melalui Litbang Lintas Matra dan Litbang Matra serta memanfaatkan program Litbang Riset Unggulan Kemitraan (RUK) bidang pertahanan bersama Kementerian Ristek RI.

**3. Pola pengadaan Alutsista**

- a. Mengutamakan pengadaan alutsista pada hal-hal yang dirasakan kebutuhannya mendesak.
- b. Mengurangi pembelian Alutsista dari luar negeri yang dibiayai dengan dana rupiah bila Alutsista tersebut telah dapat diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri. Pembelian Alutsista dari luar negeri sejauh mungkin harus melibatkan industri nasional terkait dalam upaya memacu kemandirian industri dalam negeri.

**Pertanyaan 8.**

Secara khusus perairan blok Ambalat, yang merupakan wilayah teritorial Indonesia, perlu terus ditingkatkan pengamanannya untuk menjamin integritas teritorial serta memastikan keamanan pelaksanaan operasi eksplorasi minyak oleh perusahaan-perusahaan pemegang konsensi Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, bagaimana strategi pengamanan di kawasan perairan Ambalat tersebut, serta dukungan Alutsista, personil dan anggaran yang dibutuhkan.

**Jawaban:**

Kebijakan Panglima TNI dalam penanganan masalah blok Ambalat.

- a. Dalam mengamankan perbatasan di wilayah perairan Laut Sulawesi khususnya blok Ambalat, penggelaran kekuatan TNI ke obyek sasaran lebih ditujukan untuk menunjukkan keseriusan kita dalam mempertahankan klaim negara RI atas wilayah tersebut. Dalam kaitan dengan hal tersebut, TNI telah mengerahkan/menggelar unsur-unsurnya di wilayah tersebut, sebagai berikut:
  - 1) Kodam VI/Tpr:
    - (a) 1 Yonif-613/VI di wilayah perbatasan darat Kalimantan Timur dan Pulau Sebatik.
    - (b) 1 yonif-641/VI di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat.
    - (c) 1 Yonif-611/VI cadangan di Kalimantan Timur.
    - (d) 1 Yonif 642/VI cadangan di Kalimantan Barat.
  - 2) Koarmatim:
    - (a) 7 Kri (2 PKR, 2 PK dan 3 PC)
    - (b) 2 Pesud (NC-212 dan N-22)
    - (c) 4 Lanal
    - (d) 1 Ki Mar (+)
    - (e) 1 Tim Paska
  - 3) Koopsau II:
    - (a) 1 Flight Hawk 100/200 (4 Pswt) di Lanud Balikpapan.
    - (b) 1 Flight F-16 di Lanud Iswahyudi (digantikan oleh 1 Flight Hawk 100/200.
    - (c) 1 Pswt B-737 Intai, bersifat mobile dengan home base di Makasar.

- (d) 1 Helikopter Puma/standby SAR di Lanud Balikpapan.
- (e) 1 Tim SAR Paskhas AU di Lanud Balikpapan.
- (f) 1 SST Paskhas AU Pam Alutsista di Lanud Balikpapan.
- (g) 1 unit Satrad 225/TKN di Tarakan.

- b. Gelar unsur TNI di wilayah tersebut memang belum cukup kuat apabila harus menghadapi *perang terbuka*. Tetapi telah cukup memadai guna mengamankan kegiatan ekplorasi kekayaan alam di wilayah tersebut.
- c. Dalam mencegah dan mengantisipasi kemungkinan perkembangan situasi terburuk (perang terbuka), TNI telah melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan dan sekaligus untuk tercapainya tugas pokok TNI ke depan yaitu **membuat suatu aturan pelibatan (ROE) bagi unsur-unsur TNI AL** dalam rangka menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI khususnya di wilayah sekitar perbatasan RI-Malaysia blok Ambalat Laut Sulawesi. Tujuannya agar unsur-unsur Komando Satuan di bawah lebih jelas dalam mengambil tindakan secara proporsional dan profesional. Namun demikian di sisi lain TNI telah menyiapkan suatu rencana operasi dengan **menyusun dan membentuk suatu organisasi tugas** serta perencanaan pemenuhan alutsista untuk dihadapkan apabila perang terbuka harus terjadi agar kita dapat melakukan tindakan cepat guna dapat segera memanfaatkan momentum yang ada.
- d. Kebutuhan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan pengamanan perbatasan blok Ambalat sedang dalam proses pengajuan ke Dephan.

#### **Pertanyaan 9.**

Sehubungan dengan kebijakan Panglima TNI yang membolehkan anggota TNI aktif ikut serta dalam Pilkada, apakah hal ini tidak bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 39 butir 2 dan 4 yang menyatakan bahwa “prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya”, serta sejauhmana implikasi keputusan ini terhadap upaya membentuk TNI yang profesional?

#### **Jawaban:**

Dalam kaitan dengan Pilkada, TNI berpegang pada UU 32 Tahun 2004 jo Perppu Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah. Namun demikian untuk mengeliminasi dampak negatif dari aturan yang ada pada UU tersebut, pimpinan TNI telah mengeluarkan STR/222/2005 tanggal 13 April 2005 yang mengatur prajurit yang berkehendak untuk ikut dalam pencalonan dalam Pilkada, agar mereka mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri baik struktural maupun fungsional serta dinyatakan non aktif dari status sebagai TNI aktif serta tidak diijinkan menggunakan pangkat/seragam/atribut dan fasilitas TNI selama proses Pilkada.

Keikutsertaan prajurit TNI dalam Pilkada memang merupakan suatu yang dilematis bagi TNI.

#### **Pertanyaan 10.**

Sehubungan dengan keputusan Pemerintah yang merubah status Provinsi NAD menjadi status keadaan biasa/tertib sipil, bagaimana pemantauan Panglima mengenai tingkat potensi ancaman keamanan dan ancaman terhadap keutuhan NKRI sekarang ini di

Provinsi NAD. Se jauhmana upaya pemulihan keamanan dilakukan untuk melumpuhkan kekuatan GAM dan memulihkan rasa aman masyarakat.

**Jawaban.**

Meskipun kondisi keamanan di Provinsi NAD pasca Darsip-II telah berangsur membaik, namun ancaman faktual dari pihak GSBA-GAM masih tetap ada. Sisa kekuatan GSBA-GAM diperkirakan personel sekitar 1.200 s.d 1.500 orang dan senjata  $\pm$  500 pucuk campuran. Mereka masih melakukan tindak penghadangan, penculikan, prampokan, teror, pembunuhan, pemerasan dan lain-lain kejahatan. Dengan kondisi seperti itu maka kelanjutan Operasi pemulihan Keamanan dirasakan masih diperlukan.

Para Anggota Komisi I yang terhormat,

Demikian telah kami sampaikan jawaban atas pertanyaan tertulis yang telah diajukan para Anggota Dewan yang terhormat dari Komisi I DPR RI. Sekiranya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami persilahkan dan dengan senang hati kami akan berusaha untuk menjawabnya.

Terima kasih  
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juni 2005  
PANGLIMA TNI

ENDRIARTONO SUTARTO  
JENDERAL TNI